



Research Article

Konsep Pengaruh Perubahan Politik Pada Perkembangan Pendidikan Islam

Muhammad Hafiz

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Indonesia; hafiznxlio@gmail.com



Copyright © 2023 by Authors, Published by HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 02, 2023

Revised : October 26, 2023

Accepted : November 12, 2023

Available online : December 27, 2023

How to Cite : Muhammad Hafiz. (2023). The Concept of the Influence of Political Change on the Development of Islamic Education. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(4), 184-191. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i4.92>

The Concept of the Influence of Political Change on the Development of Islamic Education

Abstract. It is important for Islamic educational institutions to understand the influence of politics in their world of education. By monitoring political changes and adapting to policies and political dynamics, Islamic educational institutions can ensure the continuity and progress of their education in accordance with the needs of Muslim communities. This research is included in qualitative research based on literature study. The data sources in this research analyze works, books and journals related to the influence of political change on the development of Islamic education. The results of the research explain that there are four influences of political change in the development of Islamic education, first, namely political policy, second; Integration in the National Education System, Third; Position and Competence of Religious Courts, Fourth; Local Political Influence.

Keywords: Islamic Education, Political Change, Policy

Abstrak. Penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memahami pengaruh politik dalam dunia pendidikan mereka. Dengan memantau perubahan politik dan beradaptasi dengan kebijakan dan

dinamika politik, lembaga pendidikan Islam dapat memastikan kelangsungan dan kemajuan pendidikan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini menganalisa karya karya, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Pengaruh perubahan politik pada perkembangan pendidikan islam. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat empat Pengaruh perubahan politik dalam perkembangan pendidikan Islam pertama yaitu kebijakan politik, kedua; Integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional, Ketiga; Kedudukan dan Kompetensi Peradilan Agama, Ke-empat; Pengaruh Politik Lokal.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Perubahan politik, Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari perkembangan dan pemeliharaan identitas agama dalam masyarakat Muslim. Namun, tidak dapat dipisahkan bahwa politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia pendidikan Islam. Perubahan politik dapat membawa dampak yang besar pada perkembangan, pembiayaan, dan arah pendidikan Islam.¹

Pertama, pengaruh politik dalam pendidikan Islam terkait dengan kebijakan pendidikan. Setiap perubahan dalam pemerintahan atau kebijakan publik dapat berdampak pada pendidikan Islam. Misalnya, dengan adanya perubahan politik yang mendorong peningkatan peran agama dalam masyarakat, pemerintah dapat memberikan lebih banyak dukungan dan sumber daya untuk pendidikan Islam.

Kedua, politik juga mempengaruhi kebebasan akademik dalam pendidikan Islam. Perubahan politik yang mengarah pada otoritarianisme atau penindasan politik dapat membatasi kebebasan akademik dan menghambat perkembangan pendidikan Islam.² Sebaliknya, perubahan politik yang mengarah pada demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia dapat memperkuat kebebasan akademik dan memungkinkan perkembangan pendidikan Islam yang lebih kritis dan inovatif.

Selanjutnya, ideologi politik juga memiliki pengaruh dalam pendidikan Islam. Ideologi politik yang dominan dalam suatu negara dapat mempengaruhi isi kurikulum, metode pengajaran, dan pemahaman agama dalam pendidikan Islam. Hal ini dapat mempengaruhi cara pendidikan Islam disampaikan dan dipahami oleh siswa.³

Selain itu, politik juga berperan dalam pendanaan dan infrastruktur pendidikan Islam. Pemerintahan yang baru dapat memberikan prioritas yang berbeda dalam alokasi dana untuk pendidikan Islam dan memperbaiki infrastruktur pendidikan. Dengan adanya perubahan politik yang mendukung investasi dalam pendidikan, pendidikan Islam dapat memperoleh sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.

¹ Muhammad Rais, "Eksistensi Pesantren Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia," *Stain Sorong Papua* (2015).

² Musaddad Harahap, "Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol.1, No. 1 (24 Agustus 2017): 87-103.

³ Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *Matan : Journal Of Islam And Muslim Society*, Vol.1, No. 1 (26 Oktober 2019): 39.

Dengan demikian, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk memahami pengaruh politik dalam dunia pendidikan mereka. Dengan memantau perubahan politik dan beradaptasi dengan kebijakan dan dinamika politik, lembaga pendidikan Islam dapat memastikan kelangsungan dan kemajuan pendidikan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kajian literatur, yang melibatkan penggali data dan informasi dari berbagai sumber yang terdapat di perpustakaan. Sumber sumber ini mencakup buku, majalah, dokumen sejarah dan berbagai bahan referensi lainnya. Sumber data dalam jurnal ini dibagi menjadi dua kategori, yakni data utama (primer) dan data tambahan (sekunder). Oleh karena itu penelitian ini masuk dalam jenis kajian literatur, sumber data utama yang mana melibatkan buku-buku dan jurnal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berarti analisis data ini dilakukan secara kualitatif dengan mengamati seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku-buku baik yang bersumber dari sumber utama maupun sumber tambahan. Proses analisis data yang melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data, pengelompokan data menjadi unit-unit tertentu, klasifikasi data dan akhirnya penafsiran data.

PEMBAHASAN

Pengertian Politik

Pada pandangan yang umum, terdapat kesan yang tidak baik dalam makna yang terkandung dalam kata “politik” dalam pengertian ini terdapat contoh yaitu ketika Prof. Dr. H. M. Amin Rais Bertanya kepada salah satu politikus yang merupakan tokoh agama tentang alasan kepindahan sang tokoh dari salah satu partai ke partai lain yang sangat membingungkan para pengikutnya. Sang tokoh tersebut menjawab dengan santai arti politik tersebut, beliau berkata bahwasanya politik itu urusan dunia, sementara urusan dunia itu hanya permainan saja.⁴

Sementara untuk makna yang berkonotasi negatif, kata politik dipahami sebagai bidang kegiatan yang mengandung unsur-unsur kecurangan, hipokrisi, ambisi buta, penghianatan, penipuan dan sejumlah kata lainnya yang mengandung makna kurang terpuji.⁵ Dari pemahaman seperti inilah maka dapat dipahami, kenapa sebagian orang tua mewanti-wanti putra-putrinya untuk tidak terjun ke dunia politik.

Terlepas dari kesalahpahaman masyarakat umum seperti yang ditunjukkan di atas, kajian politik ternyata merupakan kajian yang sangat menarik. Banyak pakar yang ikut serta dalam pembahasan dan pengembangannya, baik dalam pemikiran politik pada umumnya maupun pada khususnya, yang dikaitkan dengan konsep-konsep pendidikan tertentu, seperti agama, budaya, dan lain-lain.

⁴ Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar Dan Burhanuddin Yusuf, “Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik),” *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol.4, No. 1 (27 Juni 2018), 115.

⁵ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1996), 23.

Kata atau istilah “politik” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata bahasa Inggris, yakni *politic*, yang secara harfiah bermakna (1) *acting or judging wisely; prudent* (2) *well judged; prudent* atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak.⁶ Kata tersebut juga bermakna *The art of government* atau tata pemerintahan/seni pemerintahan.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “politik” diartikan dengan (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan); dan juga diartikan sebagai Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; dan juga diartikan sebagai Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).⁸

Setelah mengkaji sejumlah defenisi tentang politik, Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim menyimpulkan pengertian politik kepada dua kecenderungan. Pertama, yang defenisi yang mengaitkannya dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua defenisi yang mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan.⁹

Dari definisi-definisi sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kata atau istilah “politik” berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik terbatas pada kategori masyarakat tertentu dalam skala kecil, atau dalam skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam skala besar. tingkat internasional. Ruang lingkupnya mencakup cara memperolehnya dan cara mengelolanya menurut aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara di mana ia diterapkan. Singkatnya, politik adalah pengelolaan negara.

Politik dalam Pandangan Cendikiawan dan Ulama

Islam memiliki para cendikiawan dan ulama yang sangat ahli dalam bidang filsafat, matematika, dokter, fisika, astronomi dan bidang lainnya, dalam hal ini akan menjelaskan para cendikiawan dan ulama dalam bidang politik, salah satu ulama yang menjelaskan tentang politik yaitu Ibnu Tamiyah.

Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Siyasah as-Syar’iyyah*¹⁰ menjelaskan: “Wajib diketahui bahwa mengurus dan melayani kepentingan manusia merupakan kewajiban terbesar agama dimana agama dan dunia tidak bisa tegak tanpanya. Sungguh bani Adam tidak akan lengkap kemaslahatannya dalam agama tanpa adanya jamaah dan tidak ada jamaah tanpa adanya kepemimpinan. Nabi bersabda: ‘Jika keluar tiga orang untuk bersafar maka hendaklah mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin’ (HR. Abu Daud). Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan *amar ma’ruf nahi munkar*, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji,

⁶ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary Of Current English* (New York: Oxford University Press, 1986), 646.

⁷ Noah Webster, *Webster’s Dictionary* (Miami: P. S. I. Associates, 1986), 285.

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 886.

⁹ Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 35.

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah As-Syar’iyah Fi Islah Al-Rai’ Wa Al-Rai’yyah*. (Beirut: Dar Fikr Lubnan, 1992), 168.

mengumpulkan zakat, mengadakan sholat led, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud.”

Lebih jauh Ibnu Taimiyyah mengutip Khalid Ibrahim Jindan berpendapat bahwa kedudukan agama dan negara ”saling berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, sementara tanpa wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.”

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurus rakyatnya seperti yang dilakukan penggembala yang dilakukan kepada gembalanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan.¹¹

Pendapat Ibnu Aqil seperti yang dikutip Ibnu Qayyim mendefinisikan: “*Siyasah syar’iyyah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan. *Siyasah* yang merupakan hasil pemikiran manusia tersebut harus berlandaskan kepada etika agama dan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariah”.¹²

Imam Al Mawardi¹³ dalam “*Ahkamus Sultaniyyah Wal Walayatud Diniyah*” menjelaskan *siyasah syar’iyah* sebagai: “Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (*hirosatud din wa raiyyatud dunya*).”

Al Ghazali melukiskan hubungan antara agama dengan kekuasaan politik dengan ungkapan: “Sultan (disini berarti kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia; ketertiban dunia wajib untuk ketertiban agama; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para Rasul.¹⁴ Jadi wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya.”

Asyaid Imam Hasan Al Banna¹⁵ menjelaskan politik adalah, “Hal memikirkan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa) dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain).”

¹¹ Abdullah Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Umul Qura* (2015).

¹² M Rizwan Dan Dahlan A Rahman, “Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun Siyasah ‘Adilah,” Vol.7 (2022).

¹³ Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah Wa Al Wilayat Al Diniyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2006).

¹⁴ Mubasyaroh Mubasyaroh, “Pola Kepemimpinan Rasulullah: Cerminan Sistem Politik Islam,” *Politea*, Vol.1, No. 2 (1 Desember 2018): 95.

¹⁵ Dudung Abdullah, “Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar,” Vol.1, No. 1 (2012).

Hubungan politik dan Pendidikan

Hubungan politik dan Pendidikan Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.

Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam system sosial politik disetiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat disuatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik disetiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara-Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.¹⁶

Pengaruh Perubahan Politik Pada Perkembangan Pendidikan Islam.

Perubahan politik membawa dampak besar terhadap perkembangan pendidikan Islam. Adapun beberapa dampak perubahan politik terhadap perkembangan pendidikan Islam:

1. Kebijakan Pendidikan

Perubahan politik dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam. Pemerintah dapat mengubah

¹⁶ Abdul Hakim, "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam," *Program Pascasarjana Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2019).

kebijakan pendidikan yang berdampak pada kurikulum, pembiayaan, dan pengelolaan lembaga pendidikan Islam.¹⁷

2. Integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional

Perubahan politik juga dapat mempengaruhi integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Dalam beberapa periode, terjadi perubahan pendekatan pemerintah terhadap pendidikan Islam, mulai dari fokus pada pendidikan Islam tradisional hingga mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam kurikulum nasional.¹⁸

3. Kedudukan dan Kompetensi Peradilan Agama

Perubahan politik juga dapat mempengaruhi status dan yurisdiksi pengadilan agama. Dalam beberapa kasus, perubahan politik dapat mempengaruhi kebijakan terkait keadilan agama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendidikan agama dan hukum Islam.

PENUTUP

Politik berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik terbatas pada kategori masyarakat tertentu dalam skala kecil, atau dalam skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam skala besar. tingkat internasional. Ruang lingkungannya mencakup cara memperolehnya dan cara mengelolanya menurut aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara di mana ia diterapkan. Singkatnya, politik adalah pengelolaan negara.

Adapun beberapa poin Pengaruh perubahan politik dalam perkembangan pendidikan Islam pertama yaitu kebijakan politik, kedua; Integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional, Ketiga; Kedudukan dan Kompetensi Peradilan Agama, Keempat; Pengaruh Politik Lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Muin Salim. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Hakim. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam." *Program Pascasarjana Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2019).
- Abdullah, Dudung. "Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir Al-Manar." Vol.1, No. 1 (2012).
- Abu Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Mawardi. *Al Ahkam Al Sulthaniyah Wa Al Wilayat Al Diniyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.
- Arief Firmansyah, & Amirudin. (2023). Understanding and History of the Development of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Al-Fadlan: Journal of Islamic Education and Teaching*, 1(2), 81–91. <https://doi.org/10.61166/fadlan.v1i2.36>
- A.S. Hornby. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*. New York: Oxford University Press, 1986.

¹⁷ Suwarno, "Pendekatan Kebijakan Publik Dalam Politik Pendidikan Islam," *Jurnal As-Salam*, Vol.1, No. 1 (2016).

¹⁸ Sigit Priatmoko, "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0" (2018).

- Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar, Dan Burhanuddin Yusuf. "Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)." *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah*, Vol.4, No. 1 (27 Juni 2018): 114–130.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *Matan : Journal Of Islam And Muslim Society*, Vol.1, No. 1 (26 Oktober 2019): 39.
- Harahap, Musaddad. "Refleksi Dinamika Kebebasan Akademis Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, Vol.1, No. 1 (24 Agustus 2017): 87–103.
- Ibnu Taimiyah. *As-Syiasah As-Syar'iyah Fi Islah Al-Rai' Wa Al-Rai'yyah*. Beirut: Dar Fikr Lubnan, 1992.
- M. Amin Rais. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Pola Kepemimpinan Rasulullah: Cerminan Sistem Politik Islam." *Politea*, Vol.1, No. 2 (1 Desember 2018): 95.
- Munir, A. A. (2018) "AGAMA, POLITIK DAN FUNDAMENTALISME", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1(1), pp. 149–169. doi: 10.31943/afkar_journal.v1i1.12.
- Nasir Hassan Wani. (2023). Peace In Islam In The Light Of The Holy Quran And Hadith. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(3), 162–170. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i3.67>
- Noah Webster. *Webster's Dictionary*. Miami: P. S. I. Associates, 1986.
- Priatmoko, Sigit. "Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0" (2018).
- Rais, Muhammad. "Eksistensi Pesantren Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia." *Stain Sorong Papua* (2015).
- Rizwan, M, Dan Dahlan A Rahman. "Studi Pemikiran Politik Islam: Membangun Siyasah 'Adilah." Vol.7 (2022).
- Sopia Larasati, & Muhammad Al Mighwar. (2023). History of the Development of Education in Indonesia. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(3), 142–150. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i3.85>
- Suwarno. "Pendekatan Kebijakan Publik Dalam Politik Pendidikan Islam." *Jurnal As-Salam*, Vol.1, No. 1 (2016).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Zawawi, Abdullah. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Umul Qura* (2015).